

## Konflik dan Kekerasan di Media Sosial: Kajian Pemikiran Axel Honneth

Hendrikus Ageng Pranowo<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Indonesia.

\* Author Email: [henrikusageng14@gmail.com](mailto:henrikusageng14@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

#### *Keywords:*

Social media;  
Recognition;  
Conflict;  
Violence;  
Axel Honneth.

---

#### *Article history:*

Received 2024-09-17  
Revised 2024-12-16  
Accepted 2024-12-16

---

### ABSTRACT

The emergence of conflict and violence on social media is increasing along with the search for recognition by individuals in cyberspace. This study aims to analyze the roots of conflict and violence on social media using Axel Honneth's recognition theory. This study uses a qualitative method with data collection techniques through literature studies on Honneth's thoughts and the phenomenon of conflict on social media. The results of the study show that individuals' efforts to seek recognition and existential validation on social media often result in negative comments, hate speech, and violence. This study contributes to providing an alternative perspective to understand and address conflict and violence on social media through a recognition theory approach.

---

### ABSTRAK

Kemunculan konflik dan kekerasan di media sosial semakin meningkat seiring dengan pencarian pengakuan oleh individu di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar konflik dan kekerasan di media sosial menggunakan teori pengakuan Axel Honneth. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur terhadap pemikiran Honneth dan fenomena konflik di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya individu untuk mencari pengakuan dan validasi eksistensial di media sosial sering kali berujung pada komentar negatif, ujaran kebencian, dan kekerasan. Studi ini berkontribusi dalam memberikan perspektif alternatif untuk memahami dan mengatasi konflik dan kekerasan di media sosial melalui pendekatan teori pengakuan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## 1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan industri modern telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam cara individu mengaktualisasikan eksistensinya (Rahayu et al., 2019; Setia & Haq, 2023; Siddiqui & Singh, 2016). Di masa lalu, eksistensi manusia sering kali diwujudkan melalui jam kerja dan proses produksi. Namun, dengan kemajuan teknologi yang mengakuisisi sebagian besar aspek tersebut, manusia kini menggunakan media sosial sebagai sarana baru untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri (Castells, 2004; Napitsunargo, 2024). Bahkan, manusia menyadari bahwa peradaban teknologis yang maju tidak berarti sikap mental manusia pun otomatis telah ber-evolusi. Kontradiksi (Haq et al., 2024). Fenomena ini dapat dilihat melalui kebiasaan masyarakat modern yang menggunakan media sosial sebagai ruang publik untuk menyampaikan opini, ideologi, dan bahkan perasaan pribadi.

Sebagai platform yang memungkinkan interaksi tanpa batas fisik, media sosial kini bukan hanya sekadar ruang interaksi global, tetapi juga menjadi sarana untuk mencari pengakuan dan validasi atas eksistensi diri (Del Vicario et al., 2019). Bagi masyarakat modern yang hidup dalam era kemajuan teknologi informasi, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari (Abidin, 2016; Xincheng Yu Eduardo Blanco & Hong, 2024). Kebiasaan membagikan aktivitas pribadi di media sosial menunjukkan bahwa individu semakin bergantung pada pengakuan dari masyarakat sebagai suatu kebutuhan eksistensial. Pengakuan ini, dalam konteks sosial, penting untuk membentuk, mempertahankan, dan mengembangkan identitas individu (Siddiqui & Singh, 2016).

Namun, pencarian pengakuan ini sering kali mengarah pada masalah sosial yang lebih kompleks. Dalam banyak kasus, alih-alih mendapatkan pengakuan yang positif, individu justru menghadapi komentar negatif, ujaran kebencian, diskriminasi, bahkan ancaman di media sosial (Dulkiah & Setia, 2020; Kušen & Strembeck, 2018; Nastiti et al., 2018; Waseem & Hovy, 2016). Situasi ini memicu konflik dan kekerasan yang terus meningkat di ruang virtual, membuat media sosial tidak hanya menjadi tempat interaksi, tetapi juga arena pertarungan eksistensial. Inilah yang kemudian menimbulkan masalah penelitian sosial penting: bagaimana media sosial, sebagai ruang pencarian pengakuan, berpotensi menjadi sumber konflik dan kekerasan? Bagaimana akar konflik ini dapat dipahami dan diatasi?

Penelitian mengenai konflik dan kekerasan di media sosial telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Gohdes (2018) meneliti bagaimana internet, khususnya media sosial, berperan dalam memicu konflik kekerasan, dengan fokus pada cara platform digital digunakan untuk menyebarkan informasi dan mengkoordinasi aksi kekerasan. Studi tersebut menekankan bahwa internet dapat memperparah konflik dengan menyediakan ruang bagi aktor non-negara untuk terlibat dalam tindakan kekerasan. Stray dkk. (2023) melanjutkan kajian ini dengan mengeksplorasi bagaimana algoritma media sosial dapat mengelola polarisasi dan kekerasan, menunjukkan bahwa algoritma memperburuk dinamika konflik dengan memprioritaskan konten yang bersifat ekstrem dan memecah belah. Di sisi lain, Stuart (2020) melihat bagaimana kekerasan geng perkotaan telah bertransformasi dengan hadirnya media sosial, di mana media sosial digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan status dan reputasi, serta mengintensifkan konflik geng di lingkungan perkotaan.

Wahlström dan Törnberg (2021) memperluas diskusi ini dengan memfokuskan pada kekerasan politik sayap kanan di media sosial. Mereka mengidentifikasi mekanisme diskursif dan dinamika kelompok yang mendorong koordinasi kekerasan, serta bagaimana media sosial menawarkan peluang baru bagi aktor-aktor ekstremis. Penelitian Idler dan Tkacova (2024) lebih jauh lagi mengkaji pergeseran spasial dalam kekerasan terkait konflik, menunjukkan bahwa perubahan dalam dinamika ruang konflik juga berdampak pada kekerasan yang terjadi di media sosial, khususnya dalam mengubah pola konflik kekerasan.

Selain itu, studi Huang dkk. (2021) berfokus pada *cyberbullying* di kalangan mahasiswa di Tiongkok, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan prevalensi kekerasan di ruang virtual. Penelitian Molnar (2022) memberikan perspektif yang berbeda dengan meneliti bagaimana

anak muda menggunakan media sosial untuk belajar menantang kekerasan berbasis gender, namun tetap menyoroti bagaimana media sosial dapat memperkuat bentuk-bentuk kekerasan tertentu.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran media sosial dalam memicu, memperparah, dan mengelola kekerasan. Namun, studi-studi tersebut masih kurang membahas hubungan antara pencarian pengakuan di media sosial dengan konflik dan kekerasan yang terjadi di platform tersebut. Studi ini mengisi gap tersebut dengan menggunakan teori pengakuan Axel Honneth untuk menganalisis bagaimana kebutuhan eksistensial untuk pengakuan dapat menjadi pemicu konflik dan kekerasan di media sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan intersubjektif yang memandang konflik di media sosial sebagai perwujudan dari perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, menawarkan perspektif baru dalam memahami akar kekerasan di ruang maya.

Penelitian ini menggunakan teori pengakuan dari Axel Honneth. Honneth berpendapat bahwa pengakuan merupakan elemen fundamental dalam proses pembentukan identitas individu, yang diperoleh melalui interaksi sosial. Teori ini sangat relevan dalam konteks media sosial, di mana individu terus mencari pengakuan atas eksistensinya. Melalui pendekatan Honneth, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar konflik dan kekerasan yang terjadi di media sosial. Teori Honneth memberikan perspektif kritis yang tidak hanya fokus pada perjuangan individu atau kelompok untuk memperoleh pengakuan, tetapi juga menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pencarian pengakuan dapat menjadi sumber konflik yang merusak interaksi sosial di ruang virtual.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif. Sementara, titik tolak tulisan ini berangkat dari pergeseran penggunaan media sosial yang semula sebagai ruang interaksi virtual, kini telah menjadi ruang bagi individu untuk mencari pengakuan dari masyarakat sekaligus menjadi sarana pembebasan bagi individu dan komunitas (Song, 2020). Melalui unggahan di media sosial, individu dapat mengaktualisasikan dirinya dan diakui keberadaannya secara ontologis oleh masyarakat (Djunatan et al., 2024).

Pada gilirannya, media sosial menjadi ruang dan sarana aktualisasi bagi masyarakat modern (Huang et al., 2021). Dalam fase inilah dapat ditemukan salah satu sumber konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Ketika individu mencari dan mengharapkan pengakuan eksistensial serta kebebasan melalui media sosial justru yang didapatkan adalah penolakan, ujaran kebencian, diskriminasi bahkan ancaman (Haq, 2021; Haq & Sen, 2021; Wahlström & Törnberg, 2021). Melalui kacamata filosofis Axel Honneth terutama melalui teori pengakuannya, tulisan ini berusaha melacak sekaligus membahasakan sebab dan akar konflik yang terjadi dalam media sosial.

Sementara teknik pengumpulan datanya melalui studi literatur. Sumber utama yang dijadikan acuan dalam tulisan ini adalah buku Axel Honneth yang berjudul *The Struggle of Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict* (1995). Selain menggunakan karya Axel Honneth, artikel ini juga menggunakan referensi pendukung lainnya untuk memperkuat analisis dan argumen yang disajikan dalam tulisan ini. Melalui referensi yang digunakan, tulisan ini bertujuan menganalisis sekaligus membahas akar konflik dan kekerasan yang terjadi dalam media sosial terutama melalui sudut pandang teori pengakuan Axel Honneth (Miles & Huberman, 2013). Pada akhirnya, melalui teori pengakuan Axel Honneth dapat memberikan suatu pemahaman baik secara teoritis maupun praktis dalam menyikapi konflik dan kekerasan dalam media sosial.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Sosok dan Karya Axel Honneth

Axel Honneth (Honneth, 1995) dikenal sebagai salah satu filsuf dari mazhab Frankfurt generasi ketiga setelah Marx Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno

dan Jürgen Habermas. Ketertarikan Axel Honneth pada studi tentang masyarakat dimulai ketika ia bergabung dalam gerakan mahasiswa dan politik progresif dalam rentang tahun 1960 hingga 1974 (Zurn, 2015). Keterlibatan Axel Honneth dalam gerakan mahasiswa dan politik progresif memungkinkan dirinya untuk semakin mendalami berbagai ilmu khususnya di bidang sosial-politik di berbagai tempat. Dalam dunia akademis, Axel Honneth menenggelamkan dirinya dalam bidang filsafat, sosiologi, politik, hukum, sejarah dan sastra Jerman. Pada tahun 1974 Axel Honneth meraih gelar master dalam bidang filsafat di Universitas Bochum. Axel Honneth melanjutkan studi doktoralnya di Institut Sosiologi Universitas Bebas Berlin dari tahun 1974 hingga 1982 (Celikates et al., 2023). Selama masa doktoralnya, Axel Honneth bersama rekannya Hans Joas juga aktif dalam menuangkan gagasan dan ide mereka khususnya di bidang sosiologi. Puncaknya, Axel Honneth dan Hans Joas kemudian menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Social Action and Human Nature* (Fontes, 2023).

Dalam perkembangannya sebagai seorang akademisi, Axel Honneth tumbuh di bawah pengaruh dan bimbingan Jürgen Habermas. Pada tahun 1983, ketika Habermas kembali ke Frankfurt, Axel Honneth juga mengikutinya dan menjadi *Hochschulassistent* dalam bidang filsafat di bawah bimbingan Habermas (Zurn, 2015). Sekitar tahun 1990, Axel Honneth menyelesaikan proyek doktoral kedua sebagai salah satu syarat untuk naik jenjang dalam hierarki akademis di Jerman. Disertasi doktoral keduanya berjudul *Kampf um Anerkennung* atau *The Struggle for Recognition*. Selanjutnya *The Struggle for Recognition* kelak menjadi teori kritis sekaligus ciri khas yang melekat dari Axel Honneth dalam memahami transformasi masyarakat.

Axel Honneth sempat tinggal di Berlin dalam rentang tahun 1992 hingga 1996 untuk menempati posisi sebagai profesor di bidang filsafat politik di Universitas Bebas Berlin. Dalam aktivitasnya seorang akademisi, Axel Honneth banyak memberikan kelas di berbagai universitas di Jerman, Belanda, Prancis dan Amerika Serikat. Bahkan ia sempat menjabat sebagai profesor di bidang humaniora di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Axel Honneth merupakan seorang intelektual yang cukup aktif dan produktif dalam menuangkan gagasannya ke dalam serangkaian buku dan jurnal. Beberapa karya Axel Honneth di antaranya; *Social Action and Human Nature*, *Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Theory*, *The Fragmented World of the Social: Essays in Social and Political Philosophy*, *The Struggle for Recognition: Moral Grammar of Social Conflict*, *Reification: A New Look at an Old Idea*, *Redistribution and Recognition* dan *Freedom Rights* (Celikates et al., 2023).

### 3.2. Media Sosial: Ruang Interaksi Global Sekaligus Menjadi Ruang Konflik dan Kekerasan

Tujuan awal dari internet sebetulnya bukan digunakan untuk keperluan interaksi sosial dan ekspansi dalam bidang bisnis dan ekonomi. Pada tahun 1969, sebuah jaringan komputer didirikan oleh ARPA (*Advanced Research Projects and Agency*) dalam batas tertentu jaringan komputer digunakan untuk keperluan militer. Namun, tugas pamungkas dari jaringan komputer adalah untuk memobilisasi sumber daya penelitian dari berbagai universitas dan sebagai wadah pertukaran informasi di antara kalangan komunitas peneliti (Allmer, 2015). Singkatnya, internet digunakan untuk keperluan militer dan tugas utamanya adalah pertukaran informasi dan pengembangan dalam dunia akademis. Sejarah kemunculan dan fungsi internet tidak dapat dijelaskan dari silsilah bisnis dan ekonomi, lantaran pada masa itu internet belum mendapat izin agar dapat digunakan untuk keperluan ekonomi dan bisnis.

Dalam perkembangannya, para penulis sekaligus pengamat seperti Roger Burrows, Danah Boyd, Nicole Ellison dan Christian Fuchs berpendapat bahwa kini fungsi internet telah bertransformasi ke arah yang lebih kompleks (Allmer, 2015). Jika pada mulanya kemunculan internet berorientasi pada pengembangan informasi dalam dunia militer dan akademis, kini internet lebih berorientasi pada dimensi komunikasi dan kerja sama multilateral (Atton, 2003). Hal ini dibuktikan

dengan seiring perkembangan teknologi komunikasi-informasi mendorong munculnya media komunikasi massa berbasis virtual. Kini internet tidak hanya digunakan sebagai ruang dan sarana pertukaran informasi, namun juga menjadi ruang perjumpaan serta interaksi masyarakat global. Bahkan dalam perkembangannya. Internet juga berperan besar dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai aktivitas pasar daring atau lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*.

Penggunaan internet semakin kompleks terutama ketika dialihkan sebagai media komunikasi massa. Pada gilirannya media komunikasi massa berbasis internet telah mengikat masyarakat ke dalam satu komunitas jaringan interaksi global. Manuel Castells (Castells, 2004) menyebut komunitas ini sebagai masyarakat jejaring atau *network society*. Media sosial tidak hanya mengubah gaya komunikasi masyarakat. Pada saat yang bersamaan media sosial telah merestorasi cara pandang masyarakat modern terhadap dunia tempat mereka tinggal.

Melalui media sosial dunia tidak lagi dipahami secara terbatas dan lokal, namun dunia kini dipahami sebagai kesatuan dimensi tanpa batas. Sistem komunikasi baru ini secara radikal mengubah konsep ruang dan waktu, suatu dimensi yang paling vital dalam kehidupan manusia (Castells, 2010). Virtualitas internet dan media sosial telah melepaskan dunia dari batasan fisik dunyawinya, sehingga semakin memudahkan proses interaksi dan kerja sama. Hal ini dimungkinkan lantaran melalui internet dan media sosial manusia selalu terhubung satu sama lain secara global. Misalnya melalui media sosial memungkinkan proses interaksi antar individu dan pertukaran informasi antar benua dapat terealisasi dengan begitu ringkas, singkat dan cepat.

Secara umum media sosial sebagai media massa berbasis virtual mempunyai tiga karakteristik (Biagi, 2016). *Pertama*, pesan atau informasi disampaikan melalui suatu bentuk atau sistem komunikasi massal seperti internet atau media sosial. *Kedua*, pesan atau informasi dapat dikirim secara luas dan dapat diterima dengan cepat. Pada titik inilah kecepatan dalam mengirim dan menerima informasi menjadi poin penting dalam proses komunikasi dan transaksi di era modern. Masyarakat modern menjadikan informasi sebagai salah satu syarat untuk tetap eksis di lingkungan tempat mereka tinggal. Ketidaktahuan mengenai informasi aktual menandakan bahwa seseorang tidak eksis di lingkungannya. Oleh karena itu kecepatan dalam mengirim dan menerima informasi menjadi salah satu elemen penting saat ini. *Ketiga*, pesan atau informasi mampu menjangkau atau dapat diakses oleh masyarakat secara bersamaan atau dalam waktu relatif singkat. Dapat dikatakan, peran media massa berbasis virtual di era modern mencakup sebagai sarana penyedia informasi, ruang perjumpaan dan interaksi global sekaligus sebagai penunjang eksistensi masyarakat modern.

John Perry Barlow dalam bukunya yang berjudul *A Declaration of the Independence of Cyberspace* melihat bahwa dunia sedang dibangun sebagai sebuah dimensi di mana semua orang dapat masuk tanpa hak istimewa, prasangka bahkan dapat mengekspresikan keyakinannya dengan bebas (Carrigan & Fatsis, 2021). Media sosial sebagai ruang virtual seolah menjadi 'tanah perjanjian' yang meruntuhkan sekat dan batasan masyarakat dalam dunia material. Dengan kata lain suatu dunia ideal yang tidak dipengaruhi oleh status sosial seseorang. Setiap individu dapat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan opini dan keyakinannya. Bahkan pada titik ekstremnya, media sosial digunakan sebagai sarana doktrinisasi ideologi tertentu. Dalam hal ini media sosial mempunyai peran dalam membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat modern tentang dunia sosialnya. Pada gilirannya, secara tidak langsung media sosial juga menciptakan pola masyarakat yang tersegmentasi. Hal ini terjadi bukan didasarkan pada perbedaan status sosial masyarakat melainkan berdasarkan selera dan konten yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Youichi Ito menganalisis penggunaan media di Jepang dan ia melihat bahwa adanya evolusi masyarakat massa menjadi masyarakat yang tersegmentasi. Sebetulnya tersegmentasinya masyarakat berdasarkan konten yang dikonsumsi dapat menjadi titik mula munculnya konflik. Dalam hal ini konten atau karakteristik pesan sebagai medium dapat memengaruhi masyarakat



untuk terdiferensiasi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Misalnya kelompok massa dengan konten A berbeda pendapat atau keyakinan dengan kelompok massa dengan konten B. Atau massa yang saling beradu argumen menyoal salah satu konten dalam media sosial. Hal ini semakin kompleks ketika informasi yang disajikan di media sosial masih disesaki dengan konten fiktif, berita yang tidak memiliki sumber jelas atau bahkan hoaks. Dengan adanya hal tersebut semakin mendorong munculnya konflik dalam komunitas masyarakat jejaring ke titik ekstremnya.

Masyarakat jejaring yang tersegmentasi ini mendorong munculnya semacam rasa nasionalisme mikro kosmik dalam lingkup komunitas-komunitas kecil. Hal ini dimungkinkan dengan adanya rasa memiliki dan kesetiaan sebagai anggota terhadap komunitas (Törnberg & Törnberg, 2014). Munculnya masyarakat sebagai massa yang tersegmentasi pada gilirannya mengarah pada suatu kecenderungan untuk melihat adanya perbedaan dengan komunitas lain atau paradigma alternatif yang berbeda dengan arus budaya utama. Kecenderungan ini bahkan dapat berujung pada sikap superioritas di antara komunitas dalam aspek tertentu. Namun, hal ini dapat menimbulkan implikasi yang kompleks serta dapat berpotensi menimbulkan konflik yang berkelanjutan jika dikaitkan dengan perbedaan keyakinan, ideologi, dan politik (Törnberg & Törnberg, 2014).

Diskusi mengenai manusia terutama di era interaksi global dalam media sosial sebetulnya tak lepas dari perbincangan mengenai batas-batas. Meskipun dalam media sosial segala batasan fisik dan material dapat dikesampingkan. Namun ada batas-batas yang samar muncul tetapi dapat memengaruhi dinamika interaksi masyarakat di dalam media sosial. Batasan tersebut adalah sekat pemisah bahwa manusia sebagai individu berbeda dengan sang liyan atau individu lain sebagai *the others*. Batasan ini dimaknai sebagai wadah teritorial yang menunjukkan kontras bahwa 'aku' tidak sama dengan 'yang lain' (Piliang, 2020).

Ketidaksamaan ini bukan dilihat dalam spektrum yang lebih luas misalnya komunitas, keyakinan atau ideologi. Akan tetapi lebih mengarah pada perbedaan antar manusia sebagai individu yang otonom. Pada saat bersamaan melalui batasan ini manusia memahami eksistensinya sebagai individu yang terpisah dari individu lain atau *the others*. Dengan kata lain, melalui batasan dan kehadiran sang liyan atau *the others* manusia dapat mendefinisikan sekaligus memahami eksistensi dirinya sebagai individu yang khas. Benteng pemisah inilah yang menjadi alat bantu dalam membangun definisi diri sendiri, terutama dalam relasi individu dengan masyarakat (Piliang, 2020).

Dengan adanya batas-batas pemisah ini, konstruksi relasi antara individu dalam masyarakat selalu berpotensi ke arah positif sekaligus negatif. Relasi dalam masyarakat tidak dapat dirumuskan secara pasti bahkan tidak selalu sejalan, karena adanya batas antar individu yang secara langsung berimplikasi pada relasi itu sendiri (Piliang, 2020). Konstruksi relasi mengarah pada hal positif ketika 'batas' atau 'perbedaan' bukan dilihat sebagai hambatan dalam menjalin kerja sama antar individu. Hal ini dapat dibuktikan ketika perbedaan individu maupun komunitas tidak menghambat evolusi peradaban manusia. Namun, di sisi lain batas-batas ini justru dapat menjadi titik awal dari konflik karena melihat batas atau perbedaan sebagai 'ancaman' terhadap kelangsungan eksistensi individu atau komunitas. Terutama ketika batas dan perbedaan dikaitkan dengan keyakinan dan ideologi tertentu. Hal ini semakin menanamkan konsep bahwa masyarakat selalu terpolarisasi, membagi masyarakat ke dalam *ingroup* dan *outgroup* atau 'kita' dan 'mereka' (Shirch, 2021).

Konstruksi relasi yang terjadi dalam dunia material juga berlaku dalam dunia virtual, terutama dalam ruang komunikasi media sosial. Selain 'perjuangan akan pengakuan', penulis meyakini bahwa sedikitnya terdapat tiga alasan bahwa konstruksi relasi dan komunikasi dalam media sosial rentan terhadap konflik dan kekerasan. *Pertama*, tidak ada batasan atau kelas sosial dalam komunitas masyarakat jejaring. Hal ini mengandaikan bahwa dalam media sosial masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mengutarakan opininya. Tidak adanya status sosial dalam komunitas masyarakat virtual, justru membuat kebebasan masyarakat dalam menyampaikan opini menjadi tidak

terkontrol. Tak jarang opini yang ditemukan dalam media sosial bersifat demagogis sehingga berujung pada konflik.

*Kedua*, konten atau informasi yang dimuat dalam media sosial tak jarang bernuansa polisemik bahkan fiktif, sehingga memantik diskusi dan opini publik. Di sinilah masyarakat jejaring kemudian tersegmentasi ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesamaan atau perbedaan opini. Media sosial menjadi ruang diskusi rasional sepihak tatkala masyarakat justru mencari informasi yang dapat memperkuat pendapat mereka dan terlindungi dari pendapat atau sudut pandang yang berbeda (Törnberg & Törnberg, 2014). *Ketiga*, dialog atau interaksi destruktif yang membangun serta memelihara relasi dominasi dan rivalitas antar individu atau komunitas dalam masyarakat jejaring. Dialog atau interaksi destruktif dalam media sosial biasanya berupa ujaran kebencian, pelecehan, diskriminasi, perundungan bahkan ancaman. Pada gilirannya media sosial menjadi tempat yang aman sekaligus ideal bagi meluasnya ujaran kebencian bahkan retorika yang cenderung memuat unsur demagogi dan ekstrimisme.

### 3.3. Memahami Konflik dan Kekerasan dalam Media Sosial Melalui Kacamata Axel Honneth

Diskusi mengenai kemunculan media sosial perlu ditinjau tidak hanya dari segi positifnya saja bagi masyarakat saat ini. Di satu sisi, teknologi media sosial tidak hanya menawarkan metode baru dalam menghubungkan masyarakat ke dalam satu komunitas jaringan. Namun di sisi lain teknologi media sosial juga menimbulkan dampak yang tak terbayangkan terhadap perdamaian bahkan keamanan bagi masyarakat (Shirch, 2021). Dapat dikatakan konstruksi relasi dalam media sosial justru sangat rentan untuk memicu munculnya konflik dan kekerasan. Fenomena konflik dan kekerasan dalam media sosial mengajak kita untuk merefleksikan dengan sadar dan kritis bahwa sebetulnya mengapa interaksi dalam media sosial sangat rentan jatuh ke dalam konflik dan kekerasan?

Teori sosial kritis Axel Honneth berakar pada perjuangan sosial kontemporer untuk mendapatkan pengakuan dan kebebasan sosial (Zurn, 2015). Dalam konteks individu, teori pengakuan Axel Honneth meyakini bahwa subjektivitas terbentuk melalui dialog intersubjektif. Dengan kata lain, individu menjadi dirinya sendiri melalui interaksi dengan masyarakat. Hal ini mengandaikan bahwa individu selalu bergantung dengan orang lain untuk menemukan definisi bagi dirinya sendiri. Ketergantungan ini semakin memantapkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Relasi yang dibangun dalam masyarakat pada gilirannya mempunyai dampak pada konstruksi subjektivitas individu. Namun subjektivitas diri yang efektif hanya dimungkinkan sejauh adanya penerimaan dan pengakuan positif dari masyarakat. Penerimaan dan pengakuan bahwa individu adalah subjek yang unik, atau 'khas' dalam bahasa Hegel.

Honneth menggunakan titik tolak yang berbeda dari pandangan Machiavelli dan Thomas Hobbes menyoal *state of nature* manusia. Pemikiran Machiavelli dan Hobbes menjadi jalan pembuka bagi filsafat sosial modern. Dalam tulisan-tulisan politiknya, Machiavelli menyatakan bahwa masing-masing subjek dan komunitas politik selalu bertentangan satu sama lain yang menyasar pada pemenuhan kepentingan pribadi (Honneth, 1995). Di sini secara radikal, Machiavelli meyakini bahwa secara naluriah manusia adalah makhluk egosentris yang mementingkan keuntungan diri sendiri. Interaksi sosial yang dibayangkan oleh Machiavelli adalah konstruksi relasi yang tidak sehat. Lantaran dengan nalurinya umat manusia akan terus didorong oleh ambisinya untuk selalu memenuhi tujuan hidupnya salah satunya kesuksesan. Hal ini dianggap Machiavelli sebagai sesuatu yang masuk akal, mengingat egosentris dianggap sebagai salah satu mekanisme bagi manusia untuk mempertahankan diri untuk bertahan hidup.

Sedangkan menurut Hobbes, manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir mengenai kesejahteraan masa depannya (Honneth, 1995). Hal ini mendorong manusia untuk selalu mempunyai strategi preventif dalam interaksi sosial. Tujuan dari strategi ini adalah agar diri dapat

mempertahankan eksistensinya dari serangan pihak lain yang dapat mengancam diri dan kesejahteraan masa depannya. Oleh karena itu dalam interaksi sosial, manusia selalu diliputi rasa curiga sebagai alat untuk tetap dapat bertahan hidup. Pada gilirannya ketakutan inilah yang mendorong manusia untuk terus memperluas kekuasaan atau dominasinya terhadap wilayah otonomi orang lain agar dapat mempertahankan diri dari serangan pihak lain.

Jika menggunakan pemikiran Machiavelli dan Hobbes dalam membedah konflik dan perjuangan sosial yang terjadi dalam media sosial kita baru setengah jalan untuk sampai pada tujuan utama kita. Lantaran pemikiran Machiavelli dan Hobbes selanjutnya dikritisi sekaligus dikritik oleh Honneth. Axel Honneth menentang gagasan Machiavelli dan Hobbes bahwa secara alamiah sebelum adanya kesadaran moral, manusia selalu berkonflik satu sama lain yang didasarkan pada kepentingan rasional egosentris untuk memenuhi tujuan hidupnya. Penolakan Honneth terhadap kedua tokoh tersebut bukanlah tanpa sebab.

Honneth mengambil inspirasi dari pemikiran Hegel tentang peran dialog intersubjektif bagi individu. Dialog intersubjektif senantiasa memengaruhi subjektivitas individu. Pada masa itu, sejak Machiavelli, Hobbes, Descartes, Kant, bahkan Fichte premis subjek yang berpikir dan otonom menjadi alasan utama dari pembentukan subjektivitas individu (Honneth, 1995). Pengagungan terhadap diri yang rasional dan otonom bagi Hegel justru menciptakan realitas sosial yang terjebak dalam konsep dasar atomisme. Oleh karena kepentingan ego, subjek-subjek menjadi terisolasi satu dengan yang lainnya.

Hegel seolah memberikan landasan baru bahwa bukan melalui subjek yang terisolasi melainkan hubungan sosial antar subjek nalar dan moralitas sosial dapat ditemukan (Zurn, 2015). Dengan kata lain, subjek yang sadar dan berpikir ketika terlibat dalam hubungan dengan realitas sosial atau hubungan intersubjektif. Berangkat dari dialog intersubjektif Hegelian, Honneth meyakini bahwa perjuangan sosial bukan didasarkan pada pertempuran kepentingan ego untuk mencapai tujuan hidup. Bagi Honneth perjuangan sosial adalah perjuangan untuk diakui baik dalam konteks individu maupun komunitas (Zurn, 2015).

Media sosial kini menjadi ruang bagi masyarakat modern untuk mengaktualisasikan diri misalnya dengan mengunggah foto atau video. Usaha ini dilakukan dengan harapan foto atau video yang diunggah mendapat respon positif dari masyarakat. Namun, tidak semua unggahan di media sosial mendapatkan respon positif dari masyarakat terkadang justru berujung pada penghinaan, pelecehan bahkan diskriminasi. Konflik muncul ketika individu atau komunitas melakukan pemberontakan terhadap pelanggaran moral melalui sikap tidak menghormati. Khususnya ketika media sosial masih disesaki dengan konten atau opini publik berupa pelecehan, penghinaan, diskriminasi bahkan ancaman terhadap subjek atau komunitas tertentu. Dapat dikatakan, titik awal munculnya konflik sosial dalam perspektif Honneth adalah perjuangan pengakuan ketika cita-cita yang tersirat dalam tata moral masyarakat tidak sejalan dengan realitas hubungan sosial yang sebenarnya (Zurn, 2015). Yaitu pengakuan positif yang sifatnya timbal balik dalam hubungan intersubjektif. Jadi bagi Honneth perjuangan sosial bukan karena untuk memenuhi kepentingan egoistik manusia, melainkan untuk memperoleh pengakuan.

Dalam tesis Honneth, terdapat tiga struktur pengakuan dalam relasi intersubjektif. *Pertama*, pengakuan akan cinta yang dijelaskan Honneth dalam konteks hubungan persahabatan atau hubungan antara orang tua dan anak. Honneth terinspirasi dari Hegel yang memandang cinta sebagai tahap pertama dari pengakuan timbal balik karena subjek saling mengonfirmasi afeksi satu sama lain dan saling membutuhkan (Honneth, 1995). Hal ini mengandaikan bahwa cinta dalam relasi intersubjektif harus dipahami bahwa subjek menemukan dan menjadi diri sendiri melalui keberadaan orang lain di sekitarnya. Namun, idealisme Hegel dan Honneth justru berseberangan dengan fenomena yang kerap kali dijumpai dalam hubungan intersubjektif terutama di media



sosial. Konstruksi relasi yang dibangun dalam media sosial cenderung rentan pada penyangkalan atau sikap disrespek terhadap subjek lain.

Penyangkalan terhadap cinta pada dasarnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap tubuh (Majid Yar, 2012). Misalnya seperti penyiksaan, pencabulan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Pelanggaran terhadap tubuh di media sosial tidak terjadi dalam bentuk kekerasan langsung secara fisik melainkan dalam bentuk verbal (pesan atau komentar negatif). Dalam sebuah penelitian yang dirilis oleh Amnesty International pada tahun 2018 dengan judul '*Violence Against Women Online 2018*' menemukan fakta yang menyedihkan khususnya bagi eksistensi dan kebebasan perempuan. Amnesty International menganalisis bahwa terdapat jutaan pesan kasar yang ditujukan kepada perempuan di lebih dari 150 negara (Shirch, 2021).

Kekerasan verbal yang dialami perempuan dalam bentuk pesan kasar di media sosial biasanya bernuansa seksisme yang merendahkan martabat perempuan. Penyangkalan terhadap cinta intersubjektif (terutama dalam kasus pelecehan di media sosial) menghambat sekaligus merusak harga diri individu yang merasakan pengalaman tak menyenangkan. Lantaran dalam kacamata Honneth, kepercayaan diri dapat diperoleh dari pengalaman cinta intersubjektif sebagai prasyarat psikologis untuk pengembangan harga diri (Honneth, 1995). Misalnya unggahan foto atau video seseorang di media sosial mendapat reaksi atau komentar positif dari netizen akan semakin meningkatkan kepercayaan diri seseorang.

*Kedua*, pengakuan atas hak-hak legal baik itu dalam konteks individu maupun kelompok. Klaim utama Honneth adalah bahwa individu memperoleh harga dirinya dalam dan melalui hak-hak yang diberikan kepada subjek sebagai bagian dari masyarakat (Zurn, 2015). Dalam konteks warga negara, perlindungan hukum memungkinkan subjek untuk memahami dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Pengakuan sebagai anggota masyarakat memungkinkan subjek sebagai individu untuk memperoleh harga diri dan martabatnya sebagai orang bebas dan setara. Hal ini menjelaskan bahwa segmentasi masyarakat berdasarkan kelas sosial menjadi bias bahkan tidak valid. Penolakan hak legal terhadap subjek yang otonom dan setara sama dengan penolakan untuk memberikan martabat dan kesetaraan dasar manusia (Yar & Steinmetz, 2019).

Pada pemilu Zimbabwe tahun 2018, Thokozani Khupe mendapatkan perundungan secara daring dari masyarakat setelah ia maju dalam pemilu presiden. Perundungan terhadap Khupe muncul di media sosial setelah Khupe dinilai tidak layak untuk menyalonkan diri dalam pemilu presiden Zimbabwe. Kecaman, perundungan dan penolakan terhadap pencalonan Khupe semakin panas karena bagi sebagian besar masyarakat, perempuan tidak memiliki tempat dalam dunia politik (Shirch, 2021). Perempuan kerap kali menjadi sasaran pelecehan, perundungan dan diskriminasi lantaran perempuan dianggap tidak mempunyai peran yang setara dengan laki-laki dalam masyarakat. Tentu hal ini menjadi ironi tatkala di era hukum modern pengakuan atas hak-hak legal subjek sebagai individu yang otonom dan setara (terlepas dari subjek itu perempuan atau laki-laki) masih dibatasi oleh sub kultur atau kebudayaan partikular.

*Ketiga*, pengakuan solidaritas dalam bentuk penghargaan sosial terhadap subjek-subjek atas pencapaian, keterampilan atau kemampuan yang selaras dengan tujuan masyarakat (Zurn, 2015). Dalam relasi intersubjektif, masyarakat memiliki standar nilai terhadap subjek yang mengaktualisasikan dirinya lewat kekhasan, kemampuan atau pencapaian yang dimiliki. Dalam hal ini, individu memperoleh harga diri yang sehat ketika mereka telah menerima penghargaan diri dari orang lain atas pencapaian mereka. Contoh konkret dari wilayah pengakuan ini adalah Raden Ajeng Kartini tokoh perempuan dari Jepara yang dihargai masyarakat Indonesia karena beliau aktif dalam memperjuangkan eksistensi dan kesetaraan hak-hak perempuan di Indonesia. Tesis Honneth dalam pengakuan solidaritas adalah subjek diakui dan dihargai sesuai dengan nilai yang ditentukan secara sosial atas dasar karakteristik konkret mereka (Honneth, 1995). Berangkat

dari tesis Honneth, kekhasan dan keterampilan subjek menjadi cara hidup dan beraktualisasi diri yang perlu dihargai dalam hubungan intersubjektif.

Penyangkalan terhadap pengakuan solidaritas di media sosial sering terjadi dalam bentuk penyebaran disinformasi yang merugikan individu atau komunitas. Pada gilirannya penyebaran disinformasi mendorong munculnya kebencian dan prasangka negatif terhadap individu atau komunitas yang menerima pengalaman disrespek ini. Misalnya para imigran Venezuela di Brasil yang kerap kali menjadi sasaran disinformasi (Idharoel Haq & Haq, 2021; Navarro et al., 2013; Shirch, 2021). Para imigran Venezuela dituding membawa penyakit campak yang selama ini menjadi virus yang telah lama diberantas di Brasil. Pada kenyataannya isu ini digunakan oleh Jair Boslonaro (politisi sayap kanan) dalam pemilu untuk menghimpun suara masyarakat terutama di wilayah utara Brasil yang berbatasan dengan Venezuela sekaligus wilaHAqyah yang menganut nilai-nilai sayap kanan dan konservatif (Shirch, 2021).

Media sosial seolah menjadi tempat yang aman untuk membangun citra dan narasi destruktif misalnya terhadap kelompok minoritas, diskriminasi ras dan warna kulit atau pelecehan terhadap perempuan dan laki-laki. Pelanggaran dalam bentuk di atas adalah suatu penolakan untuk memberikan penghargaan terhadap cara hidup bahkan terhadap identitas subjek sebagai individu yang khas, otonom dan setara. Penyangkalan terhadap pengakuan solidaritas memungkinkan subjek akan kehilangan harga diri dan martabatnya lantaran kekhasan, keterampilan, kemampuan dan pencapaian yang dimilikinya dianggap tidak bernilai bagi masyarakat. Pada tahun 2012, Amanda Todd memilih untuk mengakhiri hidupnya setelah menerima perundungan, pelecehan, pemerasan dan penguntitan di dunia maya dan di lingkungan sekolah (Angrove, 2015). Dalam kasus Amanda Todd, penindasan dan pelecehan siber yang bernuansa seksual menjadi bentuk konkret bahwa hubungan intersubjektif negatif tidak hanya memengaruhi harga diri dan martabat subjek. Namun, pada titik didihnya kegagalan terhadap pengakuan positif dalam hubungan intersubjektif juga memiliki dampak terhadap keselamatan subjek. Ketika subjek menerima pengalaman disrespek, tak jarang justru berakhir dengan kasus penghilangan nyawa atau bunuh diri.

Sebetulnya terdapat satu model pengakuan yang mendahului tiga struktur pengakuan dalam teori pengakuan Axel Honneth. Model pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan antiseden. Gagasan mendasarnya di sini adalah sebelum hubungan intersubjektif terjadi, subjek harus menyadari bahwa mereka sedang menjalin relasi dengan manusia bukan dengan hewan atau benda (Zurn, 2015). Pengakuan antiseden dalam pemahaman Honneth digambarkan sebagai model pengakuan yang 'spontan dan tidak rasional'. Spontan dan tidak rasional di sini harus dipahami bahwa model pengakuan antiseden menyangkut 'keterlibatan simpatik' antar subjek yang berelasi.

Hal ini menggambarkan manusia sebagai makhluk emosional, sehingga keterlibatan simpatik dalam hubungan intersubjektif terjadi secara spontan tanpa menggunakan pertimbangan rasional. Singkatnya pengakuan antiseden selalu mendahului kognisi (Zurn, 2015). Namun dalam kaitannya dengan hubungan intersubjektif dalam media sosial, keterlibatan simpatik sulit terjadi karena proses komunikasi terjadi secara daring. Artinya interaksi berbasis virtual tidak memungkinkan subjek untuk memiliki kesempatan secara langsung mengalami perjumpaan dengan mitranya. Sehingga keterlibatan simpatik cenderung digantikan dengan keterlibatan antipatik. Hal ini tampak ketika seseorang melakukan pelecehan, perundungan dan penghinaan di media sosial terhadap subjek lain mengandaikan bahwa manusia justru dipandang bukan sebagai makhluk emosional yang otonom dan setara. Faktor ini menjadi satu dari sekian banyak alasan yang memungkinkan hubungan intersubjektif dalam media sosial rentan terhadap konflik dan kekerasan.

### 3.4. Membangun Hubungan Intersubjektif Positif dalam Media Sosial

Media sosial telah menjaring masyarakat modern ke dalam satu komunitas global yang memungkinkannya untuk selalu terkoneksi satu dengan yang lainnya. Tentu saja hal ini menjadi sisi positif dari munculnya media komunikasi massa berbasis virtual. Pada gilirannya kemunculan media sosial sebagai instrumen komunikasi publik memberikan akses yang lebih progresif dan aktual kepada masyarakat seperti informasi, produk bahkan hiburan. Namun perlu disadari bahwa dominasi teknologi komunikasi telah merubah cara manusia mengaktualisasikan diri dan bersosialisasi. Artinya keterjalinan masyarakat dalam ruang maya membawa banyak kemungkinan baginya untuk masuk ke dalam hubungan intersubjektif positif atau negatif.

Pada bagian sebelumnya kita telah melihat akar konflik dan kekerasan dalam media sosial sebagai bentuk atau konsekuensi dari penyangkalan terhadap pengakuan subjek (sebagai individu yang unik, otonom dan setara) dalam hubungan intersubjektif. Kini muncul satu pertanyaan lanjutan: apakah mungkin hubungan intersubjektif positif dapat terealisasi dalam media sosial? Namun kita perlu membatasi diskusi dalam tulisan ini lebih mengarah pada pembahasan konflik dan kekerasan dalam media sosial dan keterkaitannya dengan perkembangan kepercayaan diri, harga diri dan martabat manusia. Pada akhirnya kita memahami teori pengakuan Axel Honneth sebagai suatu teori konflik yang bernuansa filosofis-psikologis.

Virtualitas media sosial membuka peluang kebebasan bagi masyarakat untuk menyuarakan opininya terutama ketika realitas sosial tidak berjalan dengan semestinya. Pada tahun 2018 Pew Research menganalisis bahwa tagar *#blacklivesmatter* telah muncul sebanyak 30 juta kali di aplikasi Twitter (Lisa Shirsch, 2021). Kemunculan 30 juta tagar *#blacklivesmatter* sebagai bentuk dukungan sekaligus protes masyarakat terhadap kekerasan dan diskriminasi ras khususnya terhadap warga kulit hitam. Hubungan intersubjektif positif dalam media sosial dapat dilihat tatkala masyarakat menggunakan media sosial untuk mengoordinasikan perjuangan mengatasi tindakan represif dan disrespek terhadap subjek sebagai individu yang otonom dan setara. Pada gilirannya media sosial tidak hanya menjadi instrumen komunikasi publik, tetapi juga menjadi instrumen perjuangan sosial modern.

Hubungan intersubjektif positif dapat dimungkinkan sejauh penghargaan sosial dapat diarahkan pada kualitas tertentu yang menjadi ciri khas subjek sebagai individu yang otonom dan setara (Honneth, 1995). Hal ini mengandaikan bahwa konstruksi relasi dalam masyarakat tidak selalu mengarah pada konflik sebagai pemenuhan kepentingan egoistik dalam pemikiran Machiavelli dan Hobbes. Dalam hubungan intersubjektif positif, seseorang menjadi individu yang otonom dan setara ketika melihat orang lain sebagai mitra. Dengan kata lain, perbedaan atau karakteristik konkret seseorang bukan dilihat sebagai ancaman melainkan sebagai sarana transformasi individu yang bersifat timbal balik sekaligus dialektis. Lantaran komunitas jejaring virtual dipahami sebagai praktik komunikasi daring berkelanjutan yang menghasilkan makna dan tidak memerlukan kepentingan homogen serta konsensus mengenai nilai dan interpretasi (Christian Fuchs, n.d.).

Dalam salah satu sinier Peace Generation Indonesia, Erick Lincoln memaparkan bahwa masyarakat heterogen perlu dipahami bukan sebagai hambatan dalam membangun komunikasi dan perdamaian (Lincoln, 2021). Dengan kata lain, heterogenitas tidak pernah memuat konotasi negatif dalam kehidupan sosial. Heterogenitas, pluralitas atau perbedaan menjadi suatu cara untuk memahami diri lewat perjumpaan dengan orang lain sebagai mitra komunikasi. Pandangan Peace Generation Indonesia tentu sejalan dengan tesis Honneth, Melalui ruang komunikasi yang dibangun dalam masyarakat, individu dapat menemukan kontras antara dirinya dengan masyarakat (Lincoln & Amalee, 2007). Dalam hubungan intersubjektif individu dapat menjadi dirinya sendiri melalui hubungan sosial dan pengakuan dari masyarakat. Kontras yang ditemukan dalam hubungan intersubjektif tidak mengarah pada sikap pengagungan diri atau superioritas terhadap orang lain. Dalam sinearnya Erick Lincoln menambahkan bahwa setiap individu atau kelompok (kultur atau budaya) mempunyai karakteristik yang unik dan khas. Keunikan dan kekhasan inilah yang menjadikan semua manusia setara dalam masyarakat.

Namun, tak jarang heterogenitas masyarakat justru menjadi salah satu penyebab munculnya konflik dan kekerasan. Dalam media sosial heterogenitas masyarakat dapat dilihat dari tersegmentasinya masyarakat jejaring karena perbedaan dan persamaan opini. Tidak jarang perbedaan opini justru berujung pada diskriminasi terhadap kelompok minoritas, ujaran kebencian, perundungan bahkan pelecehan. Keadaan ini mengandaikan bahwa komunikasi dalam media sosial sangat rentan dengan konflik dan kekerasan. Dalam siniar yang berjudul '*konflik bikin kamu dewasa*', Erick Lincoln menjelaskan bahwa konflik adalah suatu hal yang tak terhindarkan (Erick Lincoln, 2021). Beliau menambahkan bahwa konflik mempunyai keuntungan (*felix culpa*) bagi diri apabila manusia dapat menyikap konflik dengan bijak. Konflik dapat menjadi sarana transformasi diri untuk menjadi lebih baik dan matang sebagai individu, kata Erick Lincoln.

#### 4. KESIMPULAN

Teori pengakuan Axel Honneth memberikan paradigma alternatif dalam memahami konflik dan kekerasan. Terutama konflik dan kekerasan yang terjadi dalam media sosial. Konflik sosial biasanya muncul sebagai respon terhadap perasaan tidak hormat, penghinaan atau pelecehan yang dialami seseorang atau kelompok (O'Neill & Smith, 2012). Dengan kata lain, konflik dan kekerasan mengandaikan bahwa pola relasi yang terjadi dalam media sosial cenderung bersifat asimetris. Artinya dalam proses interaksi subjek saling meniadakan satu dengan yang lainnya. Dari perspektif teori pengakuan Axel Honneth, kita dapat memahami bahwa konflik dan kekerasan khususnya yang terjadi dalam media sosial sebagai bentuk penolakan pengakuan terhadap subjek sebagai individu yang otonom, bebas dan setara.

Majid Yar, seorang kriminolog, memaparkan bahwa teori pengakuan Axel Honneth dapat digunakan sebagai tesis untuk menjelaskan alasan seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dengan menggunakan teori pengakuan Axel Honneth, Majid Yar melihat bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan memiliki pengalaman umum di masa lalu yang mempengaruhi pola perilakunya di kemudian hari (Yar & Steinmetz, 2019). Pengalaman ini biasanya terjadi saat masa pembentukan atau masa kanak-kanak di mana kebutuhan individu menyoal pengakuan akan cinta tidak terpenuhi. Seseorang yang mempunyai pengalaman penolakan pengakuan (biasanya terjadi saat masa kanak-kanak), mempunyai efek distorsi terhadap diri sebagai individu dan kapabilitas mereka untuk membangun hubungan timbal balik afirmatif dengan orang lain.

Dapat dikatakan konflik dan kekerasan di media sosial memiliki sifat berulang. Jika berangkat dari pemaparan Majid Yar, seseorang yang mendapat pengalaman disrespek di media sosial berpotensi dapat melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Pada gilirannya, pola ini justru memicu konflik dan kekerasan yang berkelanjutan. Teori pengakuan Axel Honneth tidak hanya membahasakan penyebab munculnya konflik dan kekerasan di media sosial. Akan tetapi, juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menyikapi konflik dan kekerasan dalam media sosial dengan bijak.

#### REFERENCES

- Abidin, C. (2016). "Aren't these just young, rich women doing vain things online?": Influencer selfies as subversive frivolity. *Social Media+ Society*, 2(2), 2056305116641342.
- Allmer, T. (2015). *Critical Theory and Social Media*. Routledge.
- Angrove, G. (2015). "She's Such a Slut!": The Sexualized Cyberbullying of Teen Girls and the Education Law Response. In J. Bailey & V. Steeves (Eds.), *eGirls, eCitizens: Putting Technology, Theory and Policy into Dialogue with Girls' and Young Women's Voices* (pp. 307–336). University of Ottawa Press.
- Atton, C. (2003). Reshaping Social Movement Media for a New Millennium. *Social Movement Studies*, 2(1), 3–15. <https://doi.org/10.1080/1474283032000062530>



- Biagi, S. (2016). *Media Impact: An Introduction to Mass Media*. Wadsworth Publishing.
- Carrigan, M., & Fatsis, L. (2021). *The Public and Their Platforms: Public Sociology in an Era of Social Media*. Bristol University Press.
- Castells, M. (2004). *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.1177/0268580907074549>
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity Second Edition With a New Preface*. United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Celikates, R., Honneth, A., & Jaeggi, R. (2023). The working sovereign: A conversation with Axel Honneth. *Journal of Classical Sociology*, 23(3), 318–338.
- Christian Fuchs. (n.d.). *Internet and Society: Social Theory in the Information Age*. Rotledge.
- Del Vicario, M., Quattrociocchi, W., Scala, A., & Zollo, F. (2019). Polarization and fake news: Early warning of potential misinformation targets. *ACM Transactions on the Web*, 13(2). <https://doi.org/10.1145/3316809>
- Djunatan, S., Haq, M. Z., Viktorahadi, R. F. B., & Samosir, L. (2024). *Kiat Sukses Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa*. Gunung Djati Publishing.
- Dulkiah, M., & Setia, P. (2020). Pola Penyebaran Hoaks Pada Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam di Kota Bandung. *SMaRT (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 4(2).
- Fontes, P. V. (2023). Recognition and normative reconstruction as a theory of justice in Axel Honneth. *Cuestiones Políticas*, 41(77), 853–866.
- Gohdes, A. R. (2018). Studying the Internet and Violent conflict. *Conflict Management and Peace Science*, 35(1), 89–106.
- Haq, M. Z. (2021). Hate Studies: The Urgency and Its Developments in the Perspective of Religious Studies. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 9(2), 375–395.
- Haq, M. Z., & Sen, H. (2021). Transforming Hate into Compassion as an Islamic Nonviolent Thought of Bediüzzaman Said Nursi. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 6(1), 13–30. <https://doi.org/10.15575/jw.v6i1.13159>
- Haq, M. Z., Sugiharto, I. B., & Purwadi, Y. S. (2024). Narasi Kiamat dan Kebuntuan Kapitalisme : Refleksi Kritis atas Kajian Mark Fisher. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 152–165.
- Honneth, A. (1995). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict* (J. Anderson (Trans.)). MIT Press.
- Huang, J., Zhong, Z., Zhang, H., & Li, L. (2021). Cyberbullying in social media and online games among Chinese college students and its associated factors. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9), 4819.
- Idharoel Haq, A. M., & Haq, M. Z. (2021). Studi Kebencian: Analisis Komparasi Pemikiran Bediüzzaman Said Nursi (1877-1960) dan K. H. Ahmad Dahlan (1868-1923). *MELINTAS*, 35(3), 258–278. <https://doi.org/10.26593/mel.v35i3.4660.258-278>
- Idler, A., & Tkacova, K. (2024). Conflict shapes in flux: Explaining spatial shift in conflict-related violence. *International Political Science Review*, 45(1), 31–52.
- Kušen, E., & Strembeck, M. (2018). Politics, sentiments, and misinformation: An analysis of the Twitter discussion on the 2016 Austrian Presidential Elections. *Online Social Networks and Media*, 5, 37–50. <https://doi.org/10.1016/j.osnem.2017.12.002>
- Lincoln, E. (2021). Podcast 12 Nilai Dasar Perdamaian: Nilai 3: Beda Kebudayaan, Tetap Berteman.”. *Generation Indonesia Podcast Audio*.
- Lincoln, E., & Amalee, I. (2007). *Peace generation: 12 nilai dasar perdamaian: buku panduan untuk guru*. Pelangi Mizan.



- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2013). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications, Inc.
- Molnar, L. I. (2022). "I Didn't Have the Language": Young People Learning to Challenge Gender-Based Violence through Consumption of Social Media. *Youth*, 2(3), 318–338.
- Napitsunargo, H. (2024). *Future is now: skepticism, new reality and infinities*. Unobtainium Photobooks.
- Nastiti, F. E., Prastyanti, R. A., Taruno, R. B., & Hariyadi, D. (2018). Social media warfare in Indonesia political campaign: A survey. *Proceedings - 2018 3rd International Conference on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering, ICITISEE 2018*, 49–53. <https://doi.org/10.1109/ICITISEE.2018.8720959>
- Navarro, J. I., Marchena, E., & Menacho, I. (2013). The Psychology of Hatred. *The Open Criminology Journal*, 6, 10–17.
- O'Neill, S., & Smith, N. H. (Eds.). (2012). *Recognition Theory as Social Research*. Palgrave Macmillan.
- Piliang, Y. A. (2020). *Setelah Dunia Dilipat: Animalitas, Parasitisme, Plastisitas*. Cantrik Pustaka.
- Rahayu, W. H., Utari, P., & Wijaya, M. (2019). The Motivation of Hoax Message Recipients in the Process of Disseminating Hoax Information on Facebook Group. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(4), 414. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i4.1015>
- Setia, P., & Haq, M. Z. (2023). Countering Radicalism in Social Media by Campaigning for Religious Moderation. *Focus*, 4(1), 13–24.
- Shirch, L. (Ed.). (2021). *Social Media Impacts on Conflict and Democracy*. Routledge.
- Siddiqui, S., & Singh, T. (2016). Social Media its Impact with Positive and Negative Aspects. *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, 5(2), 2319–8656.
- Song, X. (2020). Research on the Development Process, Development Strategy and Pattern of Media Enterprises--A Case Study of Media Brand A. *2020 4th International Seminar on Education, Management and Social Sciences (ISEMSS 2020)*, 610–616.
- Stray, J., Iyer, R., & Puig Larrauri, H. (2023). *The algorithmic Management of Polarization and Violence on social media*.
- Stuart, F. (2020). Code of the tweet: Urban gang violence in the social media age. *Social Problems*, 67(2), 191–207.
- Törnberg, A., & Törnberg, P. (2014). Intimate Communities of Hate: Why Social Media Fuels Far-Right Extremism. *Routledge*.
- Wahlström, M., & Törnberg, A. (2021). Social media mechanisms for right-wing political violence in the 21st century: Discursive opportunities, group dynamics, and co-ordination. *Terrorism and Political Violence*, 33(4), 766–787.
- Waseem, Z., & Hovy, D. (2016). Hateful symbols or hateful people? predictive features for hate speech detection on twitter. *Proceedings of the NAACL Student Research Workshop*, 88–93.
- Xinchen Yu Eduardo Blanco, & Hong, L. (2024). Hate Cannot Drive out Hate: Forecasting Conversation Incivility following Replies to Hate Speech. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 18, 1740–1752.
- Yar, M., & Steinmetz, K. F. (2019). *Cybercrime and society*. Sage.
- Zurn, C. (2015). *Axel Honneth: A Critical Theory of the Social*. Polity Press.